

KESIAPSIAGAAN DAN PEMBENTUKAN KELURAHAN TANGGUH SEBAGAI LANGKAH MEMINIMALISIR RESIKO BENCANA

Pravinska Aldino, Alvira Febrian Pristiana, Siti Maulani Rosida
Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya
Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya
pravinska@untag-sby.ac.id

Abstract

Disaster is one thing that humans cannot predict, even when disasters that come often have very detrimental effects, such as loss of life and material to damage to facilities and infrastructure. So we need a solution to find out what handling is done to anticipate the coming of a disaster and how to reduce the risk of a disaster. The research design used is the literature review method, namely research conducted by researchers through a variety of literary information (the relevant textbooks or handbooks or scientific journals). The focus of literature research is to find various theories, laws, propositions, principles, or ideas that are used to analyze and solve the formulated research questions. Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) as an effort to increase awareness and preparedness in anticipating the arrival of disasters will make the community respond quickly and appropriately so that the process of recovery, maintenance and handling can be carried out immediately. Efforts to establish a Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) are part of the strategy to create resilient urban villages because it includes activities to increase awareness and preparedness in anticipating future disasters. With the Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) the government and the community are on standby and working together to respond in the event of a disaster. If so far, when a disaster occurs, the community is completely dependent on the government, it is hoped that by involving the community, independence will emerge to actively participate in dealing with disasters both during the pre-disaster, disaster and post-disaster formation. as well as encouraging cooperation with various sectors to encourage preparedness efforts in anticipating disasters. In carrying out village resilience activities, stakeholders together with the community should carry out an assessment of the disaster risks that exist in the area. The assessment consists of three components, namely threat assessment, vulnerability assessment and capability assessment. Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) the community is provided socialization and training on disaster which aims to create an awareness of the community so that they have knowledge and skills in overcoming disaster problems that may arise in the future.

Keywords: *Preparedness, kelurahan tangguh, forum pengurangan resiko bencana.*

Abstrak

Bencana merupakan satu hal yang tidak dapat diprediksi kedatangannya oleh manusia, bahkan bencana yang datang sering kali membawa efek yang sangat merugikan, seperti kerugian jiwa dan materi sampai rusaknya sarana dan prasarana. Sehingga diperlukan sebuah solusi untuk mengetahui penanganan apa yang dilakukan untuk mengantisipasi datangnya bencana dan bagaimana mengurangi resiko terjadinya bencana. Desain penelitian yang digunakan adalah metode *literature review* yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui beragam informasi kepustakaan (*textbook* atau *handbook* yang bersangkutan ataupun jurnal ilmiah). Fokus penelitian kepustakaan adalah menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, atau gagasan yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi datangnya bencana akan membuat masyarakat merespon secara cepat dan tepat sehingga proses pemulihan, pemeliharaan dan penanganannya segera dapat dilakukan. Upaya pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) menjadi bagian dari strategi mewujudkan kelurahan tangguh karena di dalamnya mencakup kegiatan untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi datangnya bencana. Dengan adanya Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) pemerintah dan masyarakat bersama-sama siaga serta saling bekerjasama untuk merespon jika terjadi bencana. Jika selama ini saat terjadi bencana, masyarakat sepenuhnya bergantung kepada pemerintah maka diharapkan dengan melibatkan masyarakat akan muncul kemandirian untuk turut aktif menanggulangi bencana baik saat pra bencana, terjadi bencana dan pasca bencana Pembentukan kelurahan tangguh sangat penting dilakukan dengan melibatkan unsur pemerintah, masyarakat, tim relawan serta mendorong kerjasama dengan berbagai sektor untuk mendorong upaya kesiapsiagaan dalam mengantisipasi terjadinya bencana. Dalam menjalankan kegiatan kelurahan tangguh, para pemangku kepentingan bersama masyarakat seharusnya melakukan penilaian mengenai resiko-resiko bencana yang ada di wilayah tersebut. Penilaian tersebut terdiri dari tiga komponen yaitu penilaian ancaman, penilaian kerentanan dan penilaian kemampuan. Melalui Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) masyarakat diberikan sosialisasi dan pelatihan

tentang kebencanaan yang bertujuan untuk menciptakan suatu kesadaran terhadap masyarakat agar memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengatasi permasalahan bencana yang mungkin muncul disaat mendatang.

Kata Kunci : *Kesiapsiagaan, kelurahan tangguh, forum pengurangan resiko bencana.*

Pendahuluan

Bencana merupakan satu hal yang tidak dapat diprediksi kedatangannya oleh manusia, bahkan bencana yang datang sering kali membawa efek yang sangat merugikan, seperti kerugian jiwa dan materi sampai rusaknya sarana dan prasarana. Definisi bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Oleh karena itu, persoalan penanganan bencana tidak hanya sekedar mengelola saat bencana saja, namun juga pada proses sebelum dan sesudah terjadinya bencana sehingga dapat mengurangi resiko atau dampak yang timbul dari bencana (Warsono & Buchari, 2019).

Pengenalan mengenai tanda-tanda akan terjadinya bencana merupakan buah pikir masyarakat hasil dari pengamatan, pengalaman dan menelaah mengenai fenomena yang terjadi. Hal ini akan menghasilkan suatu kebiasaan masyarakat dalam memahami gejala prabencana. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana sudah mengenal teknologi yang berfungsi untuk mengenali tanda akan munculnya bencana. Namun, ada pula masyarakat yang masih menganggap cara tradisional dan konvensional lebih efektif untuk mengenali tanda akan munculnya bencana. Belajar dari bencana gempa dan tsunami Aceh-Nias di tahun 2004 yang menimbulkan korban jiwa lebih dari dua ratus ribu jiwa, Indonesia harus mempersiapkan penanggulangan bencana dengan lebih terencana. Selain itu, diperlukan juga suatu kajian yang diharapkan mampu menghasilkan peta resiko untuk setiap bencana yang ada pada suatu kawasan. Kajian dan peta resiko bencana ini harus mampu menjadi dasar yang memadai bagi daerah untuk menyusun rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana. Hasil pengkajian diharapkan masyarakat menjadi kuat dan mengerti dalam perencanaan upaya pengurangan resiko bencana (Warsono & Buchari, 2019).

Badan Nasional Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa upaya penanggulangan resiko bencana tidak hanya mendorong pemerintah, melainkan juga perlu menggerakkan individu dan seluruh lapisan masyarakat untuk dapat terlibat secara langsung dalam menanggulangi bencana. Hal ini dapat di definisikan sebagai langkah penanggulangan bencana berbasis masyarakat (Yunia et al., 2020).

Siklus penanggulangan bencana sebagaimana di jelaskan dalam UU 24 Tahun 2007 yaitu kegiatan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Pra bencana adalah tindakan yang dilakukan berupa pencegahan dan mitigasi bencana. Kegiatan mitigasi bencana dibagi menjadi dua, yaitu fisik dan non fisik. Mitigasi fisik seperti membuat bendungan dan tanggul. Sedangkan mitigasi non fisik seperti penyediaan informasi, penyuluhan dan pelatihan tentang penanggulangan bencana. Selain itu, pada situasi ini terdapat pula rencana kontijensi yaitu skenario yang dijalankan apabila terjadi keadaan darurat bencana. Saat tanggap darurat adalah tindakan dan kesiapsiagaan yang dilakukan saat terjadi keadaan darurat bencana atau bisa dikatakan menjalankan rencana kontijensi. Pasca bencana adalah tindakan pemulihan yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi hidup dan kehidupan masyarakat seperti semula atau lebih baik dibanding sebelum bencana terjadi (Ayuningtyas et al., 2022).

Komunikasi Bencana

Istilah komunikasi bencana saat ini telah banyak dilakukan setelah peristiwa bencana alam (gempa dan tsunami) di Aceh tahun 2004. Menurut Frank Dance (dalam Littlejohn, 2006) salah satu aspek penting komunikasi bencana adalah konsep reduksi ketidakpastian. Dalam penanganan bencana, informasi yang akurat diperlukan oleh masyarakat maupun lembaga swasta yang memiliki kepedulian terhadap korban bencana. Komunikasi bencana tidak saja dibutuhkan dalam kondisi darurat bencana, tetapi pada saat pra bencana yang meliputi kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi dengan tujuan mengurangi resiko bencana (Rudianto, 2019).

Komunikasi bencana adalah aktivitas yang dilakukan sebelum terjadinya bencana dengan tujuan untuk meminimalkan hilangnya nyawa, cedera atau kerusakan serta memastikan penyelamatan, bantuan darurat, rehabilitasi dan layanan lain disediakan menyusul setelah terjadinya bencana. Komunikasi bencana merupakan tahapan strategis yang sangat menentukan ketahanan masyarakat dalam menghadapi datangnya suatu bencana. (Lestari, 2018). Dua elemen aksi utama dalam komunikasi bencana yaitu pencegahan bencana dan pengurangan dampak buruk bencana melalui struktur jangka panjang seperti perundang-undangan kebencanaan, legalisasi, peraturan kebencanaan dan perencanaan daerah.

Kajian mengenai komunikasi bencana juga membahas mengenai dua pendekatan yaitu pendekatan *soft power* dan *hard power*. *Soft power* adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempersiapkan kesiapsiagaan masyarakat melalui sosialisasi dan pemberian informasi tentang bencana, sementara *hard power* adalah upaya menghadapi bencana dengan pembangunan fisik. Terdapat empat landasan utama untuk membangun komunikasi bencana yang efektif, yaitu : 1. *Customer Focus*, yaitu memahami informasi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Perlunya mekanisme komunikasi yang menjamin informasi untuk disampaikan dengan tepat dan akurat, 2. *Leadership Commitment*, yaitu pemimpin yang berperan dalam tanggap darurat harus memiliki komitmen untuk melakukan komunikasi efektif dan terlibat aktif dalam proses komunikasi, 3. *Situational Awareness*, komunikasi efektif didasari oleh pengumpulan, analisis dan diseminasi informasi yang terkendali terkait bencana. Prinsip komunikasi efektif seperti transparansi dan dapat dipercaya menjadi kunci, 4. *Media Partnership*, media seperti televisi, surat kabar dan radio adalah media yang sangat penting untuk menyampaikan informasi secara tepat kepada publik (Haddow dan Haddow, 2018).

Kesiapsiagaan Bencana

Kesiapsiagaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat dan berdaya guna. Pemahaman tentang kesiapsiagaan perlu dimengerti oleh semua kalangan masyarakat guna mengurangi dampak

yang ditimbulkan akibat bencana. Pada dasarnya kesiapsiagaan muncul dikarenakan secara psikologis pernah mengalami kejadian tersebut. Kesiapsiagaan bencana merupakan tahapan awal dari siklus penanggulangan bencana disamping kegiatan pencegahan. Kegiatan kesiapsiagaan dibagi menjadi empat tahapan yaitu tahap perencanaan, merupakan tahap awal kesiapsiagaan bencana (Aji Paramesti, 2021).

Upaya kesiapsiagaan dalam mengantisipasi terjadinya bencana yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama akan lebih berkelanjutan dan berdaya guna. Hal ini dikarenakan bencana adalah urusan bersama, karena dapat menimpa siapa saja tidak peduli usia, jenis kelamin, tingkat kesejahteraan dan latar belakang sosial. Siapapun turut bertanggung jawab dan ikut berpartisipasi dalam penanggulangan bencana. Selain itu, upaya kesiapsiagaan dalam mengantisipasi terjadinya bencana harus berdasarkan analisis resiko dan upaya sistematis untuk mengurangi resiko bencana serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, masyarakat memiliki hak yang harus dijamin oleh negara, salah satunya adalah hak mendapatkan bantuan apabila terkena bencana.

Dalam proses mewujudkan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi terjadinya bencana, masyarakat harus menjadi utama meskipun dukungan dari pihak luar juga sangat dibutuhkan. Sebab, keberhasilan pihak luar dalam memfasilitasi masyarakat untuk mewujudkan kesiapsiagaan adalah keberhasilan masyarakat juga dan diharapkan masyarakat memiliki proses peningkatan kesiapsiagaan itu sendiri (Taryana et al., 2022).

Kesiapsiagaan dalam mengantisipasi terjadinya bencana mendorong pengakuan atas hak dan ruang bagi setiap masyarakat untuk menyampaikan suaranya dalam proses peningkatan kesiapsiagaan. Warga masyarakat juga diberi kesempatan untuk mengakses atau mempengaruhi pembuatan kebijakan dan strategi kesiapsiagaan. Prakarsa kesiapsiagaan dalam penanggulangan seharusnya menjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara masyarakat dengan lembaga swadaya masyarakat, lembaga usaha maupun lembaga lainnya untuk bersama-sama mengurangi resiko bencana.

Peningkatan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi terjadinya bencana haruslah berlandaskan kemanusiaan dan mendukung peningkatan kemampuan masyarakat dengan mengembangkan sumber daya yang dimiliki masyarakat sendiri. Selain itu, upaya kesiapsiagaan mengutamakan kelompok-kelompok yang dianggap rentan di dalam masyarakat. Seperti anak-anak, penyandang disabilitas, lanjut usia dan orang sakit. Upaya kesiapsiagaan penanggulangan bencana harus mengutamakan prinsip kemitraan atau kerjasama antara masyarakat, kelompok ataupun organisasi untuk melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan bersama. Prinsip kemitraan menjadi sangat penting, karena resiko bencana dapat menimpa seluruh sendi kemanusiaan, sehingga siapapun harus terlibat (Heru Santoso et al., 2021).

Metode Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah metode literature review yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui beragam informasi kepustakaan (textbook atau handbook yang bersangkutan ataupun jurnal ilmiah). Penelitian kepustakaan atau kajian literatur (*literature review, literature research*) merupakan penelitian yang mengkaji atau meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat di dalam tubuh literatur berorientasi akademik (*academic-oriented literature*), serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya untuk topik tertentu.

Fokus penelitian kepustakaan adalah menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, atau gagasan yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca (Syaodih, 2019).

Hasil dan Pembahasan

Pembentukan Kelurahan Tangguh

Berdasarkan PERKA BNPB Nomor 1 Tahun 2012 mengenai kesiapsiagaan dalam mengantisipasi terjadinya bencana berbasis masyarakat adalah dengan dibentuknya kelurahan tangguh. Kelurahan tangguh adalah kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk

beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana. Sebuah kelurahan disebut tangguh apabila memiliki kemampuan mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu menorganisasikan sumber daya yang dimilikinya untuk mengurangi kerentanan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi resiko bencana. Secara garis besar terbentuknya kelurahan tangguh dikarenakan adanya peraturan yang mengatur tentang pengurangan resiko dan penanggulangan bencana di tingkat kelurahan (Anggoro et al., 2023).

Pembentukan kelurahan tangguh sangat penting dilakukan dengan melibatkan unsur pemerintah, masyarakat, tim relawan serta mendorong kerjasama dengan berbagai sektor untuk mendorong upaya pengurangan resiko bencana. Sumber pendanaan juga menjadi sangat penting dengan melibatkan APBD kabupaten/kota, dana mandiri masyarakat ataupun sektor swasta apabila dibutuhkan. Masyarakat juga dilibatkan untuk berperan aktif sebagai pelaku utama di dalam kegiatan kelurahan tangguh dengan diberikan pelatihan, pendidikan serta penyebaran informasi mengenai penanggulangan bencana. Selain itu terbentuknya kelurahan tangguh mendukung kelompok-kelompok yang dianggap rentan di lingkungan masyarakat seperti anak-anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia (Deasy Arisanty et al., 2022).

Tingkat kelurahan tangguh dibagi menjadi tiga, yaitu kelurahan tangguh utama adalah tingkat tertinggi yang dicapai oleh sebuah kelurahan. Kelurahan tangguh utama memiliki kebijakan pengurangan resiko bencana yang telah dilegalkan dalam bentuk peraturan desa, adanya forum pengurangan resiko bencana (FPRB) dengan anggotanya adalah masyarakat aktif, memiliki tim relawan yang aktif dalam peningkatan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana. Dengan kata lain kelurahan tangguh utama sudah mempersiapkan dengan baik dan terstruktur apa saja yang harus dilakukan jika bencana terjadi. Kelurahan tangguh madya adalah kelurahan tingkat menengah yang hampir serupa dengan kelurahan tangguh utama namun belum berfungsi penuh dalam peningkatan kapasitas, pengetahuan dan pendidikan kebencanaan. Dengan kata lain, kelurahan ini sudah mempunyai persiapan meskipun belum maksimal. Kelurahan tangguh pratama adalah kelurahan tingkat paling bawah

yang bercirikan belum memiliki kebijakan penanggulangan bencana, belum memiliki tim relawan penanggulangan bencana serta belum memiliki kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana. Dengan kata lain, kelurahan ini menjadi kelurahan yang sangat rentan dan tentunya harus menjadi prioritas terlebih dulu karena persiapan yang belum cukup (Fadilla Noor et al., 2018).

Pengembangan kelurahan tangguh dimaksudkan untuk melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak yang merugikan, meningkatkan peran masyarakat serta meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan (pihak pemerintah daerah, LSM dan perguruan tinggi) (Prastika, 2020). Keberadaan kelurahan tangguh menjadi sangat penting untuk mengantisipasi bencana serta mengetahui tanda-tanda terjadinya bencana sehingga masyarakat tidak hanya siap namun juga siaga dalam menghadapi bencana. Membangun kelurahan tangguh bukan lah suatu pilihan tetapi suatu keharusan karena bencana tidak bisa dicegah, tetapi masyarakat yang harus mengantisipasi dan siaga terhadap bencana. Semakin besar kemampuan masyarakat dalam mengelola serta siaga bencana maka akan semakin kecil dampak yang akan ditimbulkan. Masyarakat tangguh bencana digambarkan sebagai masyarakat yang memiliki pola pikir maju dan selalu mengutamakan pendekatan resiko bencana dalam setiap aktifitasnya (Neta et al., 2021).

Pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB)

Agar pengembangan kelurahan tangguh dapat terlaksana dengan baik maka dibentuklah Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) yaitu tempat berkumpulnya para pemangku kepentingan baik individu maupun lembaga yang mempunyai perhatian dan kepedulian terhadap kesiapsiagaan dalam mengantisipasi terjadinya bencana. Pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pasal 8 yang mendorong pelibatan forum dalam Penyusunan Rencana Aksi Daerah – Pengurangan Resiko Bencana (RAD-PRB).

Hadirnya Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) harus mewakili kepentingan kelompok rentan dalam proses pengambilan

keputusan. Terbentuknya Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) akan lebih menjamin keterlibatan, integrasi dan kesinambungan untuk implementasi Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Aksi Masyarakat menuju kelurahan tangguh bencana yang berakar pada masyarakat (Koem, 2019).

Selain itu, Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) haruslah memiliki kelompok kerja yang kompak, efektif dan dapat dipercaya. Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) perlu diberi kewenangan yang cukup untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah kelurahan dan pemangku kepentingan lainnya. Menggunakan konsep “dari, oleh dan untuk” masyarakat dalam keseluruhan proses (Deasy Arisanty et al., 2022).

Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) mengakomodasi potensi masyarakat sebagai sumberdaya dalam melaksanakan program penanggulangan bencana. Diharapkan masyarakat akan tanggap dan sadar bahwa mereka hidup di daerah rawan bencana, dan mempunyai kapasitas yang memadai dalam penanggulangan bencana. Implementasi pendekatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat sangat perlu, mengingat hampir semua wilayah di Indonesia merupakan rawan bencana. Masyarakat yang berada di daerah rawan bencana sebaiknya diposisikan sebagai subjek yang aktif dengan berbagai kemampuan dan kapasitasnya. Mereka mempunyai potensi berupa pengetahuan dan kearifan lokal yang sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk mengantisipasi dan melakukan penanggulangan bencana (Koem, 2019).

Dengan membentuk Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) yang beranggotakan masyarakat di wilayah itu sendiri, maka akan memicu masyarakat yang lebih peduli terhadap masalah kebencanaan. Periode atau masa kerja Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) ini selama 3 tahun sejak terbentuknya pada sidang pembentukan di kelurahan (Anggun et al., 2020).

Pada dasarnya Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) ini mempunyai prinsip partisipatif, kemitraan, inklusif, kesukarelawanan, solidaritas, kesetaraan, komitmen, non diskriminasi, toleransi, keberpihakan pada kelompok rentan dan akuntabilitas. Tidak ada yang lebih berkepentingan dalam memahami

masalah bencana di tingkat masyarakat selain masyarakat yang kerap bertahan dan bertaruh dengan bencana itu sendiri. Masyarakat memiliki kesempatan untuk lebih mengetahui tantangan, ancaman, hambatan dan kekuatan lokal dalam menghadapi bencana.

Sumber daya lokal (masyarakat) untuk kesiapsiagaan dalam mengantisipasi terjadinya bencana layak diasah dan dikembangkan secara berkelanjutan. Sejalan dengan cita-cita nasional untuk menjadi komunitas yang tangguh terhadap bencana, Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) melaksanakan misi dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Berdasarkan keyakinan tersebut, Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) memberikan kontribusi pengurangan resiko bencana melalui advokasi, pengawasan, fasilitasi dan konsultasi yang memungkinkan terjadinya pengarusutamaan pengurangan resiko bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju komunitas yang tanggap dan tahan bencana (Anggun et al., 2020).

Dalam melakukan berbagai bentuk kegiatannya, Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) tentunya mendapat dukungan dari berbagai pihak baik itu komunitas maupun lembaga pemerintah. Secara garis besar, dalam menyiapkan masyarakat untuk siaga terhadap bencana, BPBD membantu memfasilitasi terbentuknya kelurahan tangguh. Kelurahan tangguh inilah yang akan menjadi cikal bakal dalam terbentuknya Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB). Sehingga dengan terbentuknya Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) ini diharapkan masyarakat lebih mandiri dan siaga dalam menghadapi bencana dimulai dari pra bencana, saat bencana hingga pasca bencana.

Tahap pra bencana yaitu Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) mencoba mendekatkan diri dan beradaptasi kepada masyarakat sehingga masyarakat secara umum mengetahui eksistensi Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB). Pendekatan dapat dilakukan dengan cara masuk melalui forum-forum RT, kegiatan PKK dan berbagai kegiatan lainnya yang ada di wilayah tersebut. Sehingga masyarakat secara perlahan mulai bisa menangkap tentang pentingnya kesiapsiagaan dalam mengantisipasi terjadinya bencana dan penanganannya menjadi lebih terorganisir.

Setelah melakukan adaptasi, langkah selanjutnya yang dilakukan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) adalah memberikan sosialisasi mengenai kesiapsiagaan dalam mengantisipasi terjadinya bencana yang dapat dilakukan beberapa bulan sekali. Dengan adanya sosialisasi ini tentunya akan mendapatkan ilmu baru mengenai kebencanaan sekaligus menambah kapasitas sumber daya manusia di forum tersebut. Selain itu, diberikan juga pemahaman mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan bencana itu terjadi sehingga tujuan dari kesiapsiagaan dalam mengantisipasi terjadinya bencana dapat berjalan.

Untuk memperkuat pengetahuan masyarakat setelah mendapatkan pengetahuan mengenai kesiapsiagaan dalam mengantisipasi terjadinya bencana, kegiatan lanjutan yang dilakukan oleh Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) adalah melakukan simulasi bencana. Simulasi bencana ini terbagi atas dua, yaitu simulasi investigasi dan simulasi bebaran. Simulasi investigasi adalah simulasi yang dilakukan dengan cara mereplikasi situasi bencana mulai dari pra bencana, bencana sampai pasca bencana sehingga masyarakat mendapat gambaran untuk menghadapi bencana. Kegiatan simulasi ini dihadiri oleh seluruh elemen masyarakat mulai dari anak-anak, orang dewasa, manula dan kelompok rentan. Sedangkan simulasi bebaran adalah simulasi yang dilakukan dengan mengundang seluruh elemen masyarakat untuk terbuka dan bisa mengambil poin-poin penting yang diperlukan dalam menghadapi bencana. Simulasi bebaran dapat dilakukan dengan menggunakan dialog.

Setelah dilakukan langkah-langkah tahapan pra bencana, selanjutnya kegiatan yang dilakukan adalah menyiapkan posko siaga bencana. Posko siaga bencana ini nantinya akan memantau informasi kejadian bencana. Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) juga menjalin kerjasama dengan Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) dan Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) hal ini dilakukan agar terjalinnya komunikasi ketika bencana terjadi. Terlebih jangkauan sinyal radio relatif jauh sehingga menjadi keunggulan untuk saling bertukar informasi dengan wilayah lain.

Selain menyiapkan sarana komunikasi, Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB)

melakukan pengadaan tenda penampungan korban bencana sekaligus membuat skema penampungan. Biasanya, tempat yang digunakan sebagai lokasi penampungan adalah masjid. Ini dikarenakan struktur bangunan masjid memenuhi kriteria berdasarkan buku Pedoman Rencana Evakuasi yang dicetak oleh BNPB tahun 2021 yaitu memiliki air bersih dan listrik, lalu dapat diakses dengan mudah untuk pemberian bantuan baik medis maupun non medis yang berasal diluar kelurahan. Tempat penampungan boleh ditetapkan lebih dari satu lokasi dan bisa berada diluar lokasi terdampak bencana. Hal terakhir dalam tahap pra bencana adalah Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) membuat akses atau jalur ke tempat aman untuk memudahkan korban bencana dalam melakukan proses evakuasi.

Tahap saat bencana yaitu ketika terjadi situasi bencana muncul sistem early warning system atau sistem peringatan dini. Sistem peringatan dini merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam mengurangi resiko bencana. Adanya sistem peringatan dini bertujuan agar masyarakat lebih responsif untuk melakukan penyelamatan diri dan juga dapat membantu mengurangi korban jiwa sehingga dampak bencana akan sangat minim. Kemudian, Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) melakukan koordinasi bersama ketua RT atau RW terkait wilayah mana saja yang terdampak bencana lalu melakukan proses evakuasi khususnya kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak, lansia dan kelompok disabilitas.

Setelah melakukan evakuasi, Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) juga bertugas untuk menyiapkan dapur umum. Dapur umum merupakan suatu tempat dalam bentuk tenda sebagai wadah penyelenggaraan makanan dan minuman untuk korban bencana. Lokasi dapur umum biasanya berada dirumah masyarakat setempat yang sekiranya aman dan terjangkau. Selain itu sekolah juga bisa dijadikan sebagai lokasi aman untuk mendirikan dapur umum. Di dapur umum inilah beberapa masyarakat yang kuat atau mampu melakukan kegiatan memasak.

Tahap pasca bencana yaitu masyarakat yang terkena dampak bencana akan mengalami kerugian harta benda atau kehilangan anggota keluarga, sehingga Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) bekerjasama dengan beberapa

pihak membantu melakukan trauma healing kepada korban. Trauma healing ini bertujuan untuk menghibur korban khususnya anak-anak dengan cara bersenang-senang, bermain dan banyak hal lainnya untuk mengalihkan perhatian akan. Sebab trauma yang dialami anak-anak bisa berdampak ke psikologis anak jika tidak segera ditangani.

Selain itu, pasca terjadinya bencana akan membuat lingkungan sekitar menjadi kotor, akses jalan menjadi licin karena tertutupi oleh air lumpur dan juga sangat membahayakan transportasi yang lewat. Untuk mengatasi hal tersebut maka masyarakat dan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) akan bergotong royong bekerja bakti untuk membersihkan sisa-sisa pasca terjadinya bencana. Fokus awal adalah membersihkan rumah terlebih dahulu, lalu membersihkan fasilitas umum. Dalam pembersihan fasilitas ini biasanya Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) akan meminta bantuan BPBD kota/kabupaten. Kemudian Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) juga meminta pengadaan air bersih ke PDAM sehingga masyarakat dapat menikmati air bersih yang layak konsumsi. Obat-obatan juga menjadi salah satu hal yang dibutuhkan pasca terjadinya bencana, sehingga Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) akan membantu dalam pengadaan obat-obatan dengan bekerjasama dengan instansi kesehatan seperti PMI (Novian & Andhika., 2018).

Pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi datangnya bencana akan membuat masyarakat merespon secara cepat dan tepat sehingga proses pemulihan, pemeliharaan dan penanganannya segera dapat dilakukan. Upaya pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) menjadi bagian dari strategi mewujudkan kelurahan tangguh karena di dalamnya mencakup kegiatan untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi datangnya bencana. Dengan adanya Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) pemerintah dan masyarakat bersama-sama siaga serta saling bekerjasama untuk merespon jika terjadi bencana. Jika selama ini saat terjadi bencana, masyarakat sepenuhnya bergantung kepada pemerintah maka diharapkan dengan melibatkan masyarakat akan

muncul kemandirian untuk turut aktif menanggulangi bencana baik saat pra bencana, terjadi bencana dan pasca bencana (Wahyuni et al., 2022).

Kesimpulan

Pembentukan kelurahan tangguh sangat penting dilakukan dengan melibatkan unsur pemerintah, masyarakat, tim relawan serta mendorong kerjasama dengan berbagai sektor untuk mendorong upaya kesiapsiagaan dalam mengantisipasi terjadinya bencana. Dalam menjalankan kegiatan kelurahan tangguh, para pemangku kepentingan bersama masyarakat seharusnya melakukan penilaian mengenai resiko-resiko bencana yang ada di wilayah tersebut. Penilaian tersebut terdiri dari tiga komponen yaitu penilaian ancaman, penilaian kerentanan dan penilaian kemampuan.

Agar pengembangan kelurahan tangguh dapat terlaksana dengan baik maka dibentuklah Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) yaitu tempat berkumpulnya para pemangku kepentingan baik individu maupun lembaga yang mempunyai perhatian dan kepedulian terhadap kesiapsiagaan dalam mengantisipasi terjadinya bencana. Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) haruslah memiliki kelompok kerja yang kompak, efektif dan dapat dipercaya. Forum Pengurangan Resiko Bencana diharapkan mampu berperan aktif pada fase pra bencana, saat terjadi bencana/tanggap darurat dan pasca bencana.

Melalui Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) masyarakat diberikan sosialisasi dan pelatihan tentang kebencanaan yang bertujuan untuk menciptakan suatu kesadaran terhadap masyarakat agar memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengatasi permasalahan bencana yang mungkin muncul disaat mendatang. Pemahaman masyarakat mengenai kebencanaan adalah investasi keselamatan di masa depan, mengingat peristiwa bencana lebih banyak menyisakan kepiluan dan penderitaan. Sosialisasi dan pelatihan mengenai kesiapsiagaan dalam mengantisipasi terjadinya bencana dilaksanakan setelah Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) terbentuk. Kegiatan ini bertujuan agar tercipta kesadaran dan pemahaman yang baik tentang resiko bencana di tingkat masyarakat maupun mengidentifikasi cara untuk

meningkatkan ketahanan terhadap potensi terjadinya bencana.

Dengan membentuk Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) yang beranggotakan masyarakat di wilayah itu sendiri, maka akan memicu masyarakat yang lebih peduli terhadap masalah kebencanaan. Sejalan dengan cita-cita nasional untuk menjadi komunitas yang tangguh terhadap bencana, Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) melaksanakan misi dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Berdasarkan keyakinan tersebut, Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) memberikan kontribusi pengurangan resiko bencana melalui advokasi, pengawasan, fasilitasi dan konsultasi yang memungkinkan terjadinya pengarusutamaan pengurangan resiko bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju komunitas yang tangguh dan tahan bencana.

Pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi datangnya bencana akan membuat masyarakat merespon secara cepat dan tepat sehingga proses pemulihan, pemeliharaan dan penanganannya segera dapat dilakukan. Upaya pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) menjadi bagian dari strategi mewujudkan kelurahan tangguh karena di dalamnya mencakup kegiatan untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi datangnya bencana. Dengan adanya Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) pemerintah dan masyarakat bersama-sama siaga serta saling bekerjasama untuk merespon jika terjadi bencana.

Daftar Pustaka

- Aji Paramesti, C. (2021). Kesiapsiagaan Masyarakat Kawasan Teluk Pelabuhan Ratu Terhadap Bencana Gempa Bumi Dan Tsunami. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 2 (2), 113-128.
- Andhika., Angga Novian. (2018). Pengurangan Bencana Berbasis Komunitas : Penguatan Komunikasi Interpersonal dalam Pengembangan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Penanggulangan Bencana 313 Desa Langensari Kecamatan Lembang. *Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, 17 (2), 37-44.
- Anggoro, A. D., Susanto, H., Arifin, R., Nugroh, O. C., Purwati, E., & Ridho, I. N. (2023).

- Pengayoman Pemerintah Pada Masyarakat Dalam Mewujudkan Desa Tangguh Bencana. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7(1), 588–590.
- Anggun, T., Putera, R. E., & Liesmana, R. (2020). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Kecamatan Padang Selatan. *Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik (JDKP)*, 1(2), 123–137.
- Ayuningtyas, E. A. (2022). Penguatan Kapasitas Masyarakat Desa Hargomulyo Yogyakarta Dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana Longsor. *JUPADAI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2 (1), 14-20
- Deasy Arisanty, Karunia Puji Hastuti, & Henry Porda Nugroho Putro (2022). Desa Tangguh Bencana Banjir: Pemberdayaan Masyarakat Melalui Nilai Kearifan Lokal Banjar. Bandung. CV. Jendela Hasanah.
- Fadilla Noor, A., Surya Darmawan, D., Persada Bhagawadita, G., Yattaqi Nugraha, I., & Hatta Fudholi, D. (2018). Pendataan Aktivitas Masyarakat dalam Pengkategorian Desa Tangguh Bencana dan Prioritisasi Pertolongan Darurat Desa. *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATi)*, 65-66.
- Haddow, G. D., & Haddow, K. S. (2018). Application of Communications Principles to All Four Phases of Emergency Management. *Disaster Communications in a Changing Media World*, 93–119.
- Heru Santoso Wahito Nugroho, Sunarto, & Nani Surtinah. (2021). Monograf 5 Parameter Kesiapsiagaan Bencana (Gusman Arsyad, Ed.). Prodi Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surabaya.
- Koem, S. (2019). Membangun Ketahanan Berbasis Komunitas dalam Mengurangi Risiko Bencana di Desa Pilomoni Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 4(2), 211–222.
- Nana Syaodih. 2019. *Metode Penelitian Pendidikan*. PT. Remaja Rosdakarya : Bandung
- Neta, Y., Arif Firmansyah, A., Inayah, A., & Evendia, M. (2021). Inisiasi Desa Tangguh Bencana Berbasis Legal And Community Development Di Kampung Bumi Mas. *Sakai Sambayan - Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 5 (1), 33-34.
- Rudianto. (2019). Komunikasi Dalam Penanggulangan Bencana. *Jurnal Simbolika*, 1 (1), 53-55
- Taryana, A., Rifa, M., Mahmudi, E., & Bekti, H. (2022). Analisis Kesiapsiagaan Bencana Banjir Di Jakarta. *Jane (Jurnal Administrasi Negara)*, 13 (2) 302-311.
- Wahyuni, D., Syamsunasir, S., Subiyanto, A., & Azizah, M. (2022). Pemanfaatan Sistem Informasi Bencana Banjir di Kabupaten Bandung Untuk Mewujudkan Masyarakat Tangguh Bencana. *PENDIPA Journal of Science Education*, 6(2), 516–521.
- Yunia, A., Pinariya, J. M., Forceila, D., & Ivana, L. (2020). Program Berbasis Masyarakat dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Pandeglang. *Communicare : Journal of Communication Studies*, 7(2), 172.